

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- HAW. Widjaja, Peran Motivasi dalam Kepemimpinan, (Jakarta: Akademika Pressindo. 2003)
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- HAW Widjaja. Pemerintahan Desa/Marga. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)  
H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- I Nyoman Sumaryadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2005)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat), (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019)
- Lukman Santoso, Hukum Otonomi Desa (Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera), (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021)
- M. Silahuddin, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida. Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015)
- Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)

- Moch.Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang: Setara Press, 2014)
- Ni'matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, (Bandung: Nusa Media, 2014)
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007)
- Rahman Mulyawan, Masyarakat Wilayah, dan Pembangunan, (Bandung: Unpad Press, 2016)
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Rudy, Hukum Pemerintahan Desa, (Lampung: Aura, 2022)
- Saifuddin Yunus, dkk. Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017)
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Siti Kurnia Widiastuti, Pemberdayaan Masyarakat Marginal Berbasis Penelitian Komunitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015)
- Subagyo, Modern Sebagai Manusia, (Jakarta: Jembatan, 1991)
- Sulistiyan A, Teguh, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media. 2004)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: PT. Raja Grafindo, 2020)
- Syarifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)
- Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
- Tim KKN-PPM UGM 2020, Buku Profil Desa Brubuh 2020, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020)

- Tim KKN-PPM UGM 2022, Buku Profil Desa Brubuh 2022, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Vindya Budiman, Pandangan Fasiltasi Replikasi dan Pelebagaan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), (Jakarta: KOMPAK, 2021)
- Yogi Pasca Pratama, dkk, Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, (Riau: Draft Media, 2018)

### **Jurnal**

- Adie Rachmad Hidayat, Muhammad Noor, dan Endang Erawan, “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Studi Komparasi di Desa Medik dan Bente Tualan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser”, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019
- Bagus Sudibya, “Wisata Desa dan Desa Wisata” *Jurnal Bappeda Litbang*, Vol 1 No. 1 Tahun 2018
- Dwi Iriani Margayaningsih, “Peran masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa”, *Jurnal Publiciana*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2018
- Endah Vestikowati,dkk. “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Abdimas Galuh*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2020
- Fajar Sidik, “Kemiskinan dan Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Ngawi : Merumuskan Isu Strategis”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Vol.3 No. 1 Tahun 2015
- Firman, “Pernanan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemeritahan di Desa”, *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2020
- Hafiz Lasmana, “Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dn Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Pencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)”, *Jurnal ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017

- Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020
- Khoyrul Anwar, “Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Ngawi Program One Village One Product”, *Jurnal Sosio-Komunika*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022
- M. Chotim dan M.Subhan. “Evaluasi penulisan label pangan yang tidak lengkap dan iklan pangan menyesatkan pada industri rumah tangga pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2013). *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014
- Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”, *Jurnal Ekononi & Kebijakan Politik*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015
- Natanael Lainsamputty dan Benjamin C. Picauly. “Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli”. *Bacarita Law Journal*, Vol.2 No. 1 Tahun 2021
- Siska Wahyu Rahmawati,dkk. “Penetapan Sapta Pesone Pada Desa Wisata (Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 50 No. 2 Tahun 2017
- Sutanto,dkk. “Pembuatan Rumah Burung Hantu Sebagai Sarana Pengentasan Hama Tikus di Desa Tanjung Kecamatan Klego, Boyolali”. *KOMUNITA Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2022
- Tika Febriana Wati, “Analisis Kegiatan Produksi Usaha Mikro dalam Program OVOP (One Village One Product) Ditinjau dari Teori Produksi Islam (Studi Kasus Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
- Villia Samantha Rukmini, “Gambaran Pelaksanaan Taman Posyandu sebagai Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas Sidotopo Wetan”, *Medical Technology dan Publihc Health Journal*, Vol 3 No. 2 Tahun 2019
- Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal”, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  
Desa

Peraturan Kepala Desa Brubuh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES)

Peraturan Kepala Desa Brubuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-Penjabaran APBDES)

Peraturan Kepala Desa Brubuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES)

Peraturan Kepala Desa Brubuh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P- Penjabaran APBDES)

### **Website Internet**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengawasan Keuangan  
Desa dengan Aplikasi SISKEUDES,  
<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>,  
(diakses pada 5 Maret 2021, 18.03)

BPPKPD, Bimtek Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel),  
<https://www.bppkpd.id/profil-des-dan-kelurahan-prodeskel/>, (diakses  
pada 5 Maret 2023, 19.17)

BPPLPD, Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berbass Aplikasi Sistem Pengelolaan  
Aset Desa (SIPADES) 2.0 Online, [https://www.bppkpd.id/bimtek-sistem-  
pengelolaan-aset-des-sipades/](https://www.bppkpd.id/bimtek-sistem-pengelolaan-aset-des-sipades/), (diakses pada 5 Maret 2023, 18.22)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, SRIGATI,  
<https://dpmd.ngawikab.go.id/srigati-2/>, (diakses pada 5 Maret 2023, 18.37)

Kemenparekraf, “Siaran Pers: Menparekraf Dorong Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Ngawi Jatim”, [Pedulicovid19.kemenparekraf.go.id](http://Pedulicovid19.kemenparekraf.go.id), 2 Maret 2021

Nur Safriati, Cyber Extension, *Manfaat dan Cara Pembuatan Pupuk Bokashi*, <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/77617/MANFAAT-DAN-CARA-PEMBUATAN-PUPUK-BOKASHI/> (diakses pada 12 Februari 2023, 21.04)